

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

TESIS

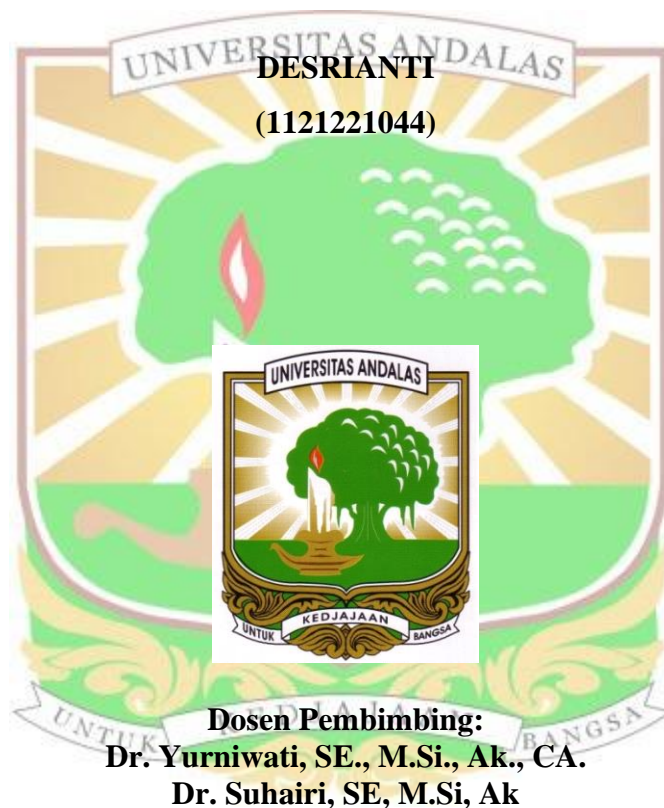


**DESRIANTI
(1121221044)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

TESIS



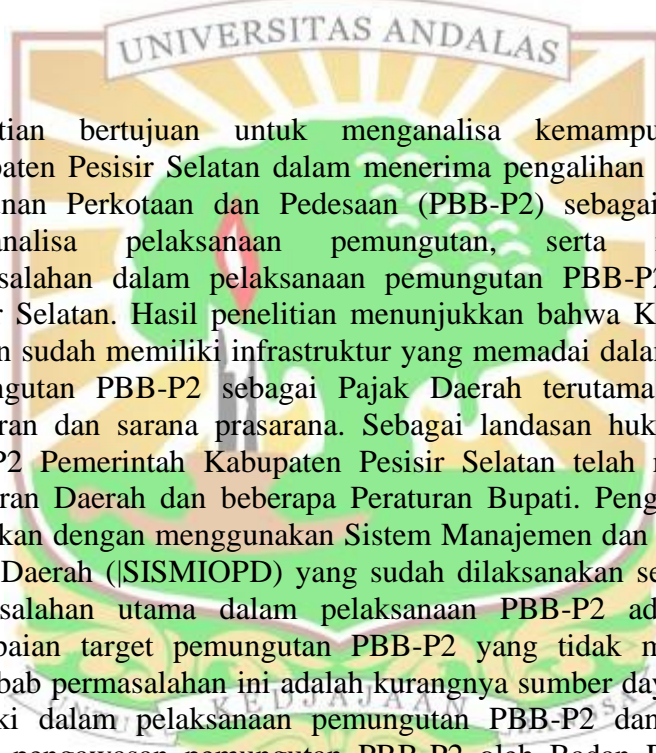
**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
2017**

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERMASALAHAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN PEDESAAN (PBB-P2)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Oleh : DESRIANTI (1121221044)

**Dibawah bimbingan : Dr. Yurniwati, SE.,Ak. M.Si, CA dan Dr. Suhairi,
SE, M.Si, Ak.**

ABSTRAK



Penelitian bertujuan untuk menganalisa kemampuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah, menganalisa pelaksanaan pemungutan, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki infrastruktur yang memadai dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah terutama terkait dengan peraturan dan sarana prasarana. Sebagai landasan hukum pelaksanaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mempersiapkan Peraturan Daerah dan beberapa Peraturan Bupati. Pengelolaan PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak Daerah (SISMIOPD) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Permasalahan utama dalam pelaksanaan PBB-P2 adalah kurangnya pencapaian target pemungutan PBB-P2 yang tidak mencapai 50 %. Penyebab permasalahan ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan belum adanya fungsi pengawasan pemungutan PBB-P2 oleh Badan Pendapatan serta Data mengenai objek pajak masih menggunakan data lama dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban membayar PBB-P2.

Kata kunci : PBB-P2, Pajak Daerah

**IMPLEMENTATION ANALYSIS AND COLLECTION PROBLEMS
RURAL URBAN EARTH AND BUILDING TAX (PBB-P2)
IN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

By : DESRIANTI (1121221044)

Under the guidance of : Dr. Yurniwati, SE., Ak. M.Si, CA and Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak.



ABSTRACT

The research aims to analyze the ability of the Pesisir Selatan Regency government to accept the transfer of Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2) as a Regional Tax, analyze the implementation of collection, and identify problems in the implementation of PBB-P2 collection in Pesisir Selatan Regency. The results showed that Pesisir Selatan Regency already has adequate infrastructure in carrying out the collection of PBB-P2 as a Regional Tax, especially related to regulations and infrastructure. As a legal basis for implementing PBB-P2, the Pesisir Selatan Regency Government has prepared Regional Regulations and several Regent Regulations. PBB-P2 management is carried out using the Regional Tax Object Management and Information System (SISMIOPD) which has been implemented since 2014. The main problem in implementing PBB-P2 is the lack of achievement of the PBB-P2 collection target which does not reach 50%. The cause of this problem is the lack of human resources in the implementation of PBB-P2 collection and the absence of a supervisory function for PBB-P2 collection by the Revenue Agency and Data on tax objects still use old data and the lack of awareness and compliance of taxpayers in carrying out their obligations to pay PBB-P2.